

**EVALUASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) DI DAERAH**

(Studi kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Oleh

SYAFIRA WIGATI

NPM 2116021016



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**EVALUASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) DI DAERAH**

(Studi kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)

Oleh

SYAFIRA WIGATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EVALUASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI DAERAH

(Studi Kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)

Oleh

Syafira Wigati

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengevaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang pada tahun 2023 belum mampu mencapai Level 3 sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab belum tercapainya Level 3 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menurut Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek *context*, program sejatinya relevan dengan kebutuhan organisasi, tetapi efektivitasnya terhambat oleh isu daerah yang melibatkan pejabat Inspektorat sehingga menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Dari aspek *input*, dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan anggaran relatif memadai, namun kebijakan *rolling* auditor dan ketergantungan pada auditor senior membatasi efektivitasnya. Dari aspek *process*, bimbingan teknis dilaksanakan sesuai pedoman dengan metode variatif dan inovatif, tetapi belum optimal akibat rendahnya partisipasi APIP serta hambatan teknis seperti lokasi dan waktu pelaksanaan. Dan dari aspek *product*, program meningkatkan pemahaman teknis sebagian APIP, namun dampaknya masih bersifat individual dan belum mendorong pencapaian kapabilitas kelembagaan menuju Level 3. Inferensi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP tidak dapat hanya mengandalkan intervensi teknis, melainkan juga membutuhkan penguatan budaya organisasi, independensi fungsi pengawasan, pengembangan early warning system terhadap potensi fraud, serta pelaksanaan evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, efektivitas program pembinaan akan lebih optimal dalam mendorong APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara mencapai Level 3 sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi, Kapabilitas, Pengawasan, Akuntabilitas, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

EVALUATION OF BPKP REPRESENTATIVES OF LAMPUNG PROVINCE IN INCREASING THE CAPACITY OF GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS (APIP) IN THE REGION

(Case Study of the APIP Inspectorate of North Lampung Regency)

By

Syafira Wigati

The enhancement of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) capability is crucial for accountability and good governance. This study evaluates APIP at the Inspectorate of North Lampung Regency, which in 2023 had not yet reached Level 3 according to Head of BPKP Regulation No. 8 of 2021. Using a descriptive qualitative method with interviews and documentation, the study applies Stufflebeam's CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). Findings show that, in terms of context, the program aligns with organizational needs, but its effectiveness is hindered by a corruption case involving Inspectorate officials, reducing credibility and public trust. Regarding input, human resources, facilities, and budgets are generally adequate; however, auditor rotation policies and dependency on senior auditors limit performance. For process, technical guidance follows guidelines with varied methods but remains suboptimal due to low APIP participation and logistical constraints. In terms of product, the program enhances some members' technical understanding, yet the impact is mostly individual and has not advanced institutional capability toward Level 3. The study concludes that capability improvement requires not only technical interventions but also strengthening organizational culture, ensuring supervisory independence, developing early warning systems against fraud, and conducting regular evaluations with all stakeholders. Consequently, the coaching program can more effectively support APIP at the Inspectorate of North Lampung Regency in achieving Level 3 while enhancing sustainable regional governance.

Keywords: Evaluation, Capability, Oversight, Accountability, Governance.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: EVALUASI BPKP PERWAKILAN PROVINSI
LAMPUNG DALAM PENINGKATAN
KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP) DI DAERAH
(STUDI KASUS PADA APIP INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Nama Mahasiswa

: Syafira Wigati

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116021016

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Himawan Indrajat, S.I.P., M.Si.
NIP. 198307272009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

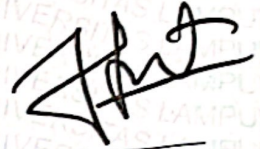
Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.
NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

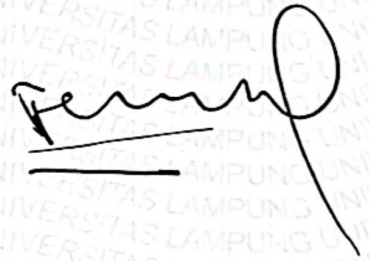
Ketua

: Himawan Indrajat, S.I.P, M.Si.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 1976082120 003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Agustus 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2025

Saya Membuat Pernyataan,



Syafira Wigati

NPM 2116021016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Syafira Wigati lahir di Bandar Lampung, 3 Maret 2003 dari pasangan Ayah Toni dan Ibu Pratiwi Ekawati, S.H. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan penuli dimulai dari bangku Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu TK Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar di SD Al-Azhar 1 Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Jenjang selanjutnya yakni sekolah menengah atas yang ditempuh penulis di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2021 dengan tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa kuliah, penulis aktif pada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan pada tahun 2022 hingga 2023. Saat mengikuti kegiatan HMJ tersebut, penulis diberikan kepercayaan menjadi pengurus pada Biro I. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selanjutnya peneliti melaksanakan MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) dalam bentuk Magang selama 1 (satu) semester atau 6 bulan di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba kita menemukan kesempatan untuk berhasil.”

(Buya Hamka)

“Berhasil atau gagal, patah atau tumbuh, bahagia atau kecewa, mudah atau berat, apapun hasilnya rayakanlah karena itu hasil dari diri sendiri. Bagian terbaik dalam hidup adalah ketika mampu bersyukur atas setiap takdir yang dialami.”

(Syafira Wigati)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil' alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
Yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Ku persembahkan karya tulis ini, untuk orang-orang yang aku sayangi :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih banyak kepada orang tua saya, Bapak Alm. Toni dan Ibu Pratiwi Ekawati, yang telah memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang, yang menjadi penyemangat, suka maupun duka, serta kepercayaan dan doa yang selalu mengalir dimanapun penulis berada, sehingga karya ini bisa terselesaikan.

Keluarga Tersayang

Kepada seluruh keluarga, terimakasih selalu memberikan motivasi, doa, dan kepercayaannya. Semoga karya ini memberikan kebanggaan dan kebahagiaan.

Para Dosen dan Staff

Terimakasih telah memberikan bekal ilmu dan juga dukungan serta doa.

Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) di Daerah (Studi Kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara)”**. Tak lupa shalawat seta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Kepada perempuan kuat yang bekerja menjadi pegawai dari pagi hari hingga menjelang petang, yang bernama Pratiwi Ekawati, yang harus melanjutkan hidupnya sendiri dikarenakan ditinggal suaminya pada tahun 2020 lalu. Perempuan itu adalah ibuku, Ibu Tiwi panggilannya. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntai doa yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT membalas segala rasa lelah dan kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiinnn ya Rabb.
2. Kepada lelaki hebat yang memiliki mimpi besar terhadap anaknya agar bisa meraih gelar sarjana dan membanggakan dirinya, yaitu Almarhum Toni, Ayahku. Yang telah berpulang 5 tahun lalu dan belum sempat saya berikan rasa kebahagiaan dan rasa bangga, tidak bisa melihat anak perempuannya menyelesaikan pendidikan terakhir hingga wisuda, Ayah kepergianmu

cukup membuatku terpukul hingga anak perempuanmu ini sempat kehilangan arah. Ayah banyak yang ingin saya ceritakan kepadamu, doaku selalu ku langitkan untukmu. Ayah, terimakasih banyak ya, bahagia selalu di surga-Nya.

3. Teruntuk nenekku dan alm. kakekku tersayang, yang sudah merawat saya sedari kecil ketika kedua orang tua saya bekerja, terimakasih sudah melimpahkan rasa kasih dan perhatiannya sewaktu saya kecil dan bisa beranjak dewasa hingga sekarang.
4. Kakakku yaitu Andesta Wahyu Prasetyo dan keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, dan juga kepercayaannya, semoga karya saya bisa menjadi kebanggaan untuk kalian.
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
6. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastusi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Bapak Himawan Indrajat, S.I.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak Bapak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk Bapak beserta keluarga.
11. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, selaku Dosen Pembahas dan Penguji Utama saya, yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih banyak sekali lagi atas tuntunan dan arahan Bapak dalam pengerjaan skripsi saya, yang akan menjadi ilmu dan pengalaman bagi hidup saya.

12. Kepada instansi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, dan informan saya yaitu : Bapak Angka Subaran, Ibu Juliaty Lumbanbatu, Bapak Bramastya, dan Bapak Bentrastyadi, telah bersedia meluangkan waktu dan juga tempat untuk saya berdiskusi terkait penelitian ini.
13. Kepada Anisa, Nadira, dan Isma, selaku sahabat penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, kebahagiaan dan bantuannya.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Heri Ardiansyah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan ikut berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Terima kasih juga telah menjadi rumah, pendamping dalam hal mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dan juga memberikan kebahagiaan penulis untuk melanjutkan hidup. Harapan penulis adalah dengan bersamamu saat ini dan hingga selamanya, semoga segala hal-hal baik dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita doakan dan inginkan.
15. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang selama ini, sudah mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan cobaan, serta tidak menyerah dalam sesulit apapun saat proses pengerjaan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dikemudian hari, Aamiin..

Bandar Lampung, 15 Agustus 2025

Penulis,

Syafira Wigati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ivii
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO	viv
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA.....	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Evaluasi Program	14
2.1.1 Pengertian Evaluasi Program.....	14
2.1.2 Model Evaluasi Program	15
2.1.3 Evaluasi Model CIPP (<i>Contexts, Input, Process, Product</i>).....	18
2.2 Tinjauan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	19
2.2.1 Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	19
2.2.2 Kapabilitas APIP	21
2.2.3 Elemen Kapabilitas APIP	23
2.3 <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM).....	25
2.4 Kerangka Berpikir	26

III	METODOLOGI PENELITIAN	29
	3.1 Tipe Penelitian.....	29
	3.2 Fokus Penelitian	29
	3.3 Lokasi Penelitian	31
	3.4 Informan Penelitian	32
	3.5 Jenis Data	33
	3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
	3.7 Teknik Pengolahan Data	35
	3.8 Teknik Analisis Data	36
	3.9 Teknik Validasi Data	37
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
	4.1 Evaluasi <i>Context</i>	40
	4.1.1 Dimensi Tujuan Program.....	40
	4.1.2 Dimensi Latar Belakang Program.....	47
	4.2 Evaluasi <i>Input</i>	55
	4.2.1 Dimensi Sumber Daya Manusia	56
	4.2.2 Dimensi Sarana dan Prasana.....	61
	4.2.3 Dimensi Anggaran dan Strategi	67
	4.3 Evaluasi <i>Process</i>	72
	4.3.1 Dimensi Pelaksanaan Program	73
	4.4 Evaluasi <i>Product</i>	80
	4.4.1 Dimensi Hasil Pelaksanaan Program	80
	4.5 Analisis Pembahasan	90
	4.5.1 Temuan Hasil Penelitian.....	91
	4.5.2 Interpretasi Hasil Penelitian Berdasarkan Model CIPP	94
V	SIMPULAN DAN SARAN.....	100
	5.1 Simpulan	100
	5.2 Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Level Kapabilitas APIP Inspektorat di Provinsi Lampung tahun 2023	6
Tabel 2. Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 ..	7
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4. Matriks Model Kapabilitas APIP	22
Tabel 5. Informan Wawancara	32
Tabel 6. Keterangan Pengambilan Data Primer	33
Tabel 7. Keterangan Pengambilan Data Sekunder	34
Tabel 8. Monitoring Penugasan	51
Tabel 9. IKK Bidang P3A	52
Tabel 10. Tingkat Pendidikan SDM BPKP Provinsi Lampung	58
Tabel 11. Auditor Yang Sudah Mengikuti Diklat	59
Tabel 12. Skor Kapabilitas APIP Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023	84
Tabel 13. Rencana Aksi APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara	85
Tabel 14. Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	27
Gambar 2. Isu Kabupaten Lampung Utara	42
Gambar 3. Kebijakan Terkait Peningkatan Kapabilitas APIP	49
Gambar 4. Jumlah SDM BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	58
Gambar 5. Website BPKP Pusat Mengenai Pengelolaan Diklat	60
Gambar 6. Website <i>Siger Library</i>	63
Gambar 7. Materi-Materi Website <i>Siger Library</i>	65
Gambar 8. Jumlah Pengguna Website <i>Siger Library</i>	66
Gambar 9. Cossit atau Rencana Biaya Perjalanan Dinas	69
Gambar 10. Kegiatan Penyampaian Materi Bimtek PK APIP	75
Gambar 11. Materi-Materi Peningkatan Kapabilitas APIP	77
Gambar 12. Laporan Hasil Bimtek PK APIP Kab. Lampura Tahun 2024	83

DAFTAR SINGKATAN

APIP	: Apart Pengawasan Intern Pemerintah
AOI	: <i>Areas Of Improvement</i>
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMD	: Badan Usaha Milih Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Nasional
CGAP	: <i>Certified Governmental Auditing Professional</i>
DAN	: Djawatan Akuntan Negara
DDPKN	: Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara
EWG	: <i>Early Warning System</i>
IACM	: <i>Internal Audit Capability Model</i>
IIARF	: <i>The Institute of Internal Auditor Research Foundation</i>
JFA	: Jabatan Fungsional Auditor
IKK	: Indikator Kunci Kinerja
KPA	: <i>Key Performance Area</i>
MOU	: <i>Momerable of Understanding</i>
P3A	: Pembinaan, Pengawasan, serta Pelaporan APIP
PK	: Peningkatan Kapabilitas
PPBR	: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya sebuah tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik. Perihal ini sangat sesuai dengan permasalahan di negara berkembang yakni terletak pada krisis ekonomi yang ada seperti di Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi yang ada di Indonesia disebabkan oleh salah satunya pengelolaan keuangan yang kurang baik dan tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad governance*). Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi beberapa aspek yakni pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pengendalian dan pengawasan merupakan sebuah aspek yang dilakukan oleh lembaga eksekutif untuk memastikan kebijakan dan sistem yang dirancang dan ditetapkan terlaksana sesuai dengan aturan-aturan sehingga terciptanya tujuan yang diharapkan. Jika ingin terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan adanya pengawasan internal dengan prosedur yang bertahap, dimulai dari sebuah tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta tahap pelaporan. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah untuk kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan atau belum memumpuni (Mardiasmo, 2005:1).

Pengawasan intern diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dari instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan intern yang dilakukan pemerintah di Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdapat dalam lingkup Kementerian atau Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sebagai pengawas internal, APIP menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, pemimpin pemerintah baik di pusat maupun daerah wajib melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, peran dan fungsi APIP yang efektif, minimal harus seperti :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah semestinya;
2. Memberikan sebuah peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas dari tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah itu sendiri.

Untuk melaksanakan peran diatas, APIP diharuskan untuk terus meningkatkan kapabilitasnya dengan memperbaiki aktivitas pengawasan dan kualitas dalam pengawasan. Peran baru tersebut dilakukan melalui kegiatan penjaminan (*assurance*), konsultansi (*consulting*), pemberian saran (*advisory service*), dan pemberian nilai tambah pada organisasi. Saat

melaksanakan pengawasan, APIP perlu terus meningkatkan efektivitas pengawasan intern untuk memenuhi peran terkait. Pemerintah sudah menugaskan APIP agar lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan intern di instansi masing-masing untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan administrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan administrasi pemerintahan sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, APIP diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap penyalahgunaan wewenang. Hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut berupa :

1. Tidak terdapat kesalahan;
2. Terdapat kesalahan administratif; atau
3. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dalam hal ini BPKP memiliki peranan dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengawalan pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan diperlukannya peningkatan kapabilitas APIP, pada tahun 2009 *The Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF)* mengusulkan enam elemen fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern pada sektor publik, dapat berperan secara aktif melalui sebuah kerangka kerja,

yang disebut sebagai *Internal Audit Capability Model (IACM)*. Model ini menggambarkan mengenai jalur peningkatan kapabilitas intern dari kondisi yang belum memumpuni menuju kondisi yang seharusnya dan efektif sesuai dengan adanya tingkatan kapabilitas, dimulai dari Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructured*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). IACM diadopsi oleh BPKP guna untuk menilai dan meningkatkan kapabilitas APIP yang ada di Indonesia. Kondisi kapabilitas APIP di Indonesia berdasarkan kriteria penilaian IACM yang dilakukan oleh BPKP Pusat pada sampai September 2016, menyatakan bahwa terdapat 628 APIP menunjukan sebanyak 445 APIP atau 70.68% yang masih berada di Level 1, 176 APIP atau 20.03% berada pada Level 2, dan 7 APIP atau 1.11% berada di Level 3.

Level kapabilitas hampir sebagian besar masih berada pada level 1, dengan terindikasi masih terdapat risiko, bahwa APIP belum bisa memberikan nilai tambah pada bidang pengawasan intern secara optimal. Berdasarkan kondisi level tersebut, dapat dikatakan masih jauh dari target pemerintah yaitu sebanyak 85% APIP di Indonesia yang menjadi target level 3 kapabilitasnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan level kapabilitas pada APIP di Indonesia.

Selain menjadi fundamental dari kapabilitas APIP, IACM juga bisa digunakan sebagai *road map* untuk mewujudkan APIP yang efektif sesuai dengan yang dimandatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam proses dan praktik peningkatan kapabilitas APIP diperlukan perbaikan untuk meningkatkan level kapabilitas untuk ke tingkat selanjutnya. Setiap tingkatan level kapabilitasnya memiliki masing-masing 1 atau beberapa area proses kunci disebut juga sebagai *Key Process Areas (KPA)*. KPA tersebut terkait dengan 6 elemen kunci peningkatan kapabilitas APIP, yang meliputi : Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Praktik Profesionalitas, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.

Dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kondisi kapabilitas yang dicapai, sehingga mengidentifikasi KPA yang sudah tercapai dan yang belum bisa optimal, yang disebut sebagai *Areas Of Improvement* (AOI). Evaluasi peningkatan kapabilitas APIP merupakan proses penting untuk memastikan bahwa APIP dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. APIP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja, serta mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil evaluasi berupa AOI merupakan point penting dalam proses perbaikan selanjutnya untuk menyusun rencana aksi dalam peningkatan kapabilitas APIP tersebut.

Selain itu, kapabilitas dan kemampuan dari APIP dalam melaksanakan pengawasan pada sektor publik khususnya yang ada di Provinsi Lampung juga masih mengalami kekurangan, atau memiliki AOI, sehingga diperlukan peningkatan kapabilitas oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung untuk menunjang kinerja APIP dalam melakukan pengawasan terhadap institusi Pemerintahan Daerah yang ada di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, dengan dilakukan pengawasan yang lebih efisien dapat diharapkan semakin meningkatkan peranan dan fungsi BPKP dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah khususnya Provinsi Lampung.

Dalam pengawasan intern dalam bentuk kapabilitas APIP, terlebih dahulu kita melihat gambaran level kapabilitas APIP Daerah untuk menilai bagaimana baik atau buruknya dari APIP itu sendiri. Di Provinsi Lampung memiliki APIP yang tersebar pada instansi yakni BPKP dan enam belas Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Kapabilitas Level APIP Daerah yang ada di Provinsi Lampung dapat menjelaskan keberhasilan dari peranan BPKP dalam membina dan memelihara APIP yang ada di Daerah. Level kapabilitas dari ke enam belas Inspektorat Daerah yang ada di Provinsi Lampung sebagai berikut.

**Tabel 1. Level Kapabilitas APIP Inspektorat di Provinsi
Lampung tahun 2023**

No.	Nama Inspektorat	Level Kapabilitas APIP
1.	Inspektorat Provinsi Lampung	3
2.	Inspektorat Kota Bandar Lampung	3
3.	Inspektorat Kota Metro	3
4.	Inspektorat Pesawaran	3
5.	Inspektorat Pringsewu	3
6.	Inspektorat Lampung Tengah	3
7.	Inspektorat Lampung Utara	2
8.	Inspektorat Lampung Barat	3
9.	Inspektorat Lampung Selatan	3
10.	Inspektorat Lampung Timur	3
11.	Inspektorat Tanggamus	3
12.	Inspektorat Way Kanan	3
13.	Inspektorat Tulang Bawang	3
14.	Inspektorat Tulang Bawang Barat	3
15.	Inspektorat Mesuji	3
16.	Inspektorat Pesisir Barat	2

(Sumber : Data diolah Peneliti, tahun 2025)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, mengenai level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah yang berada di Provinsi Lampung pada tahun 2023, dapat dilihat bahwa terdapat dua inspektorat yang level kapabilitasnya masih berada di Level 2, yang dimana level tersebut masih belum terbilang cukup untuk Kapabilitas APIP sebagaimana seharusnya. Inspektorat Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu APIP yang masih tertinggal yang masih memiliki level 2 pada elemen kapabilitas APIP berdasarkan hasil *assement* dikarenakan memiliki AOI pada salah satu dari enam elemen KPA yang terdapat dalam Matrik Model Kapabilitas APIP.

Tabel 2. Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Lampung Utara tahun 2023

No.	Elemen	Level
A.	Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)	3
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
2.	Praktik Profesional	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
5.	Struktur dan Tata Kelola	3
B.	Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)	2
1.	Peran dan Layanan	2
SIMPULAN		2

(Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi Lampung)

Pada Tabel 2 diatas, dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara masih berada di Level 2 pada elemen kapabilitas APIP dibagian elemen Peran dan Layanan. Dalam elemen peran dan layanan, terdapat topik kekurangan yang menjadi permasalahan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara ini, yakni pada topik Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Manajemen Risiko dan Konsultansi, sehingga perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan pembinaan melalui program-program oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung agar penilaian kapabilitas APIP dapat berubah menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi kekurangan atau AOI yang dimiliki APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, diperlukan adanya evaluasi program dan perbaikan kembali yang perlu dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung untuk menjawab permasalahan yang ada, dengan memperbaiki penilaian dan pembinaan pada program yang sudah dilaksanakan. Program tersebut merupakan sebuah prosedur yang dilaksanakan oleh BPKP dalam mengatasi kekurangan yang ada dalam elemen KPA kapabilitas APIP. Sehingga, dengan adanya program sosialisasi

dan bimbingan teknis tersebut, akan menghasilkan peningkatan level kapabilitas APIP yang ada di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian atau studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memberikan manfaat bagi peneliti, sehingga dapat menghindari adanya duplikasi tema penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan evaluasi program peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan peneliti terdahulu dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait, antara lain.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Deksripsi
1.	Lilik Purwanti (2019)	Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menggunakan <i>Internal Audit-Capability Model</i> .	Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi hambatan peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Sidoarjo yang masih berada pada Level 2, dikarenakan kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya SDM, dan sebagainya. Penelitian ini juga terdapat upaya yang dilakukan untuk meningkatkan level kapabilitasnya.
2.	Friesta Angela L. S. (2021)	Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih)	Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kota Prabumulih dengan menggunakan model pengembangan IA-CM, dengan mengidentifikasi kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kota Prabumulih, serta memberikan upaya dan strategi yang dapat dilakukan

			selaras dengan kendala tersebut.
3.	Firmansyah, Atiek Sri Purwati, Uswahtun Hasanah (2022)	Analisis Kapabilitas APIP Dengan Perspektif <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyumas)	Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Banyumas yang masih berada pada Level 1, dengan melihat faktor-faktor penghambat, dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Banyumas.
4.	Muhammad Yusup (2023)	Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi)	Penelitian ini berfokus pada mengevaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan membuktikan hasil penilaian mandiri, dengan mengacu pada peraturan terkait peningkatan kapabilitas APIP.
5.	Fahri Rozani Ghofar, Sri Andrianti Muin, Nurmadhani Fitri Suyuti (2024)	Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Panajam Paser Utara	Penelitian ini berfokus pada menganalisis kondisi kapabilitas Inspektorat Kabupaten Panajam Paser Utara masih berada di Level 2 pada tahun 2023, dengan memiliki kendala-kendala penghambatnya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas.

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, tahun 2025)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menggunakan *Internal Audit-Capability Model* (2019), yang berfokus pada menganalisis hambatan-hambatan pada peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Sidoarjo yang masih berada pada Level 2. Penelitian selanjutnya yaitu, yang berjudul Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Prabumulih (2021), yang berfokus pada mengevaluasi peningkatan

kapabilitas APIP Inspektorat Kota Prabumulih dengan menggunakan model pengembangan IA-CM. Penelitian selanjutnya yaitu, yang berjudul Analisis Kapabilitas APIP Dengan Perspektif *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) pada Inspektorat Kabupaten Banyumas (2022), yang berfokus pada mengidentifikasi kondisi dan tingkat kapabilitas pada APIP Inspektorat Kabupaten Banyumas yang masih berada pada Level 1. Penelitian selanjutnya yaitu, yang berjudul Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi (2023), yang berfokus pada mengevaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan menganalisis hasil penilaian mandiri, dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kapabilitas APIP. Dan penelitian terakhir yaitu, yang berjudul Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (2024), yang berfokus pada menganalisis kondisi kapabilitas Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di Level 2 pada tahun 2023.

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, baik secara fokus penelitian, tempat penelitian, dan teori yang digunakan dan yang akan diteliti. BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian dengan studi kasus pada APIP di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk beberapa alasan mendasar. Pertama, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung merupakan instansi yang memegang peran strategis dalam menilai dan membina kapabilitas APIP Daerah terutama di Provinsi Lampung, serta dalam melakukan pengawasan intern di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kedua, dalam penelitian ini berfokus pada kondisi kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung dengan menganalisis penyebab yang membuat level kapabilitas APIP Inspektorat Lampung Utara masih berada pada Level 2. Ketiga, penelitian ini mengevaluasi terhadap program peningkatan kapabilitas APIP yang berupa bimbingan teknis untuk mengatasi penyebab kurangnya efektivitas pengawasan di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini juga relevan dengan kebijakan nasional dalam mendorong good governance melalui

reformasi birokrasi dan mengatasi *fraud* di daerah. Terakhir, evaluasi peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara memiliki dampak untuk menunjang keberlanjutan pengawasan intern di Kabupaten Lampung Utara dengan adanya kualitas penelitian ini, yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang menjadikan level kapabilitasnya menjadi Level 3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa yang menyebabkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Utara belum mampu mencapai kapabilitas Level 3?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengevaluasi penyebab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Utara belum bisa mencapai Level 3 dengan melihat peran dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengetahuan mengenai bagaimana tugas BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam memantau, menilai, memelihara, membina dan meningkatkan kapabilitas APIP yang ada di daerah untuk tercapainya kesesuaian level kapabilitas APIP yang semestinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama terkait pembinaan dan peningkatan kapabilitas APIP Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi strategi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam memelihara dan membina APIP Daerah, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Evaluasi Program

2.1.1 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi merupakan sebuah keharusan dimana suatu bentuk program atau kegiatan sudah terlaksana. Melalui evaluasi, dapat diketahui bagaimana efektivitas sebuah program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan, dan jika belum sesuai maka perlu memperbaikinya.

Menurut Thoha (2003:1) mengatakan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Stufflebeam (Arikunto, dkk, 2010:1), menyatakan evaluasi merupakan suatu proses dalam mencari dan memberikan informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan dalam menentukan alternatif sebuah keputusan.

Menurut Wirawan (2009:9) menilai evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait evaluasi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses terencana yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi mengenai suatu objek. Dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur, evaluasi

memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Evaluasi juga berfungsi sebagai riset yang membantu menilai objek evaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi program menurut Sudjana (2008:22), adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh data yang berguna bagi pengambil keputusan.

Menurut Arikunto (2009:5), melaksanakan evaluasi program adalah aktivitas yang bertujuan untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai, dan evaluasi program juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang akan disampaikan kepada pengambil keputusan.

Evaluasi program juga memiliki tujuan tersendiri, hal tersebut dikemukakan oleh Mulyatiningsih (2011:114), yaitu tujuan evaluasi program sebagai berikut :

1. Evaluasi ini penting untuk pengembangan program yang serupa ditempat lain, karea menunjukkan kontribusi program terhadap pencapaian tujuan organisasi.
2. Evaluasi berguna untuk menentukan langkah selanjutnya untuk sebuah program, agar bisa dilanjutkan, diperbaiki, ataupun dihentikan.

Berdasarkan pendapat para ahli, evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang relevan. Tujuan utama dari evaluasi program adalah untuk menilai pencapaian tujuan serta menyediakan informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan.

Dalam konteks penelitian ini, evaluasi program digunakan untuk menilai efektivitas upaya peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan oleh BPKP

Perwakilan Provinsi Lampung. Dengan mempertimbangkan bahwa kapabilitas APIP saat ini masih berada pada Level 2, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan peningkatan kapabilitas telah tercapai, mengungkap penyebab, serta menyediakan informasi berbasis bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk perbaikan di masa mendatang. Sejalan dengan tujuan evaluasi menurut Mulyatiningsih (2011), hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan program serupa di wilayah lain, sekaligus menentukan langkah lanjutan apakah program peningkatan kapabilitas APIP perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

2.1.2 Model Evaluasi Program

Terdapat dua pengertian dalam istilah program, yakni pengertian secara umum dan khusus. Pengertian program secara khusus dapat diartikan dengan perencanaan, sedangkan program secara umum merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut juga sebagai sistem, yang berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan walaupun hanya satu kali akan tetapi dapat berkelanjutan (Arikunto, 2014:4). Selanjutnya, ia mengatakan bahwa apabila program ini dikaitkan dengan evaluasi program, maka didefinisikan sebagai suatu unit ataupun kesatuan kegiatan yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dengan proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Terdapat tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan sebuah program, yaitu :

1. Realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu relatif lama, bukan kegiatan tunggal, melainkan jamak berkesinambungan, dan;
3. Terjadi dalam sebuah organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Model evaluasi merupakan kreasi dari beberapa evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli dalam menjelaskan mengenai evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan penciptanya atau tahapan proses evaluasinya. Selain itu, terdapat pakar evaluasi yang membagi evaluasi dengan misi yang akan dan kepentingan yang ingin diraih serta ada yang menyesuaikan dengan anggapan yang dianutnya, atau sering disebut dengan sebuah pendekatan (Widoyoko, 2009:172).

Adapun macam-macam model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli sesuai dengan kegunaannya masing-masing, dijelaskan sebagai berikut.

1. Model Evaluasi Countenance (Stake)

Model ini merupakan evaluasi program yang sering disebut juga sebagai evaluasi pertimbangan, yang berarti evaluator mempertimbangkan program dengan membandingkan kondisi hasil program dengan keberhasilan yang terjadi pada program lain, dengan memiliki objek sasaran yang sama dengan membandingkan hasil pelaksanaan program dengan standar yang sudah ditentukan oleh program tersebut. Model Stake terdiri dari dua matrik, yaitu *description* (gambaran) dan *judgement* (pertimbangan). Matriks pertimbangan dikerjakan oleh evaluator setelah matrik deskripsi selesai dilaksanakan.

2. Model Evaluasi CIPP (*Contexts, Input, Process, Product*)

Model evaluasi CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield. Dengan menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna dalam menilai alternatif sebuah keputusan. Model evaluasi ini adalah sebuah model yang dikenal dan paling banyak digunakan oleh para evaluator. Nama model CIPP ini berasal dari *context*, *input*, *process* dan *product*.

3. Model Evaluasi *Wheel* (Roda)

Model evaluasi ini disebut roda karena menggambarkan evaluasi yang berkaitan dan berkelanjutan dari satu proses ke proses selanjutnya. Model ini digunakan dalam mengetahui program yang dilakukan suatu instansi telah berhasil, sehingga diperlukan sebuah alat untuk mengevaluasinya. Model roda ini mempunyai 3 tahap utama, yaitu: pembentukan tujuan pembelajaran, pengukuran *outcomes* pembelajaran, dan penginterpretasikan hasil pengukuran dan penilaian.

4. Model Evaluasi Kirkpatrick

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick (1959) adalah model evaluasi yang sering dikenal dengan istilah Kirkpatrick *Four Levels Evaluation Model*. Empat evaluasi tersebut antara lain : Evaluasi Reaksi, Evaluasi Belajar, Evaluasi Perilaku, dan Evaluasi Hasil. Model ini banyak digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan

5. Model Evaluasi Alkin (UCLA)

Evaluasi UCLA merupakan evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP, model evaluasi ini dikembangkan oleh Alkin, yang mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses dalam meyakinkan keputusan, memilih informasi yang sesuai, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan untuk memilih beberapa alternatif. Ia juga mengemukakan lima macam komponen evaluasi, yakni: *sistem assesment, program planning, program implementation, program improvement, program certification*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (Wirawan, 2011). Pemilihan model ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung terkait upaya peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Mengingat level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara saat ini masih berada pada Level 2, model CIPP digunakan untuk mengidentifikasi penyebab yang menghambat peningkatan level kapabilitas tersebut. Melalui pendekatan ini, evaluasi dilakukan terhadap program peningkatan kapabilitas APIP, khususnya pada aspek bimbingan teknis yang telah dilaksanakan.

2.1.3 Evaluasi Model CIPP (*Contexts, Input, Process, Product*)

Menurut Daniel L. Stufflebeam (2003) dalam Wirawan (2011:92), menyatakan bahwa evaluasi model CIPP merupakan suatu kerangka yang komperhensif dalam mengarahkan pelaksanaan evaluasi yang formatif dan sumatif terhadap objek, program, personalia, proyek, institusi, dan sistem. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukut efektivitas program, memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai rencana, serta memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dan pengembangan program berkelanjutan di masa mendatang.

Menurut Stufflebeam (Wirawan, 2011:92) Evaluasi Program Model CIPP mencakup empat tahapan evaluasi dengan masing-masing indikator, diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Evaluasi *Context*

Pada tahap ini, evaluasi pada tahap ini bertujuan untuk memahai kebutuhan, masalah dan lingkungan yang melatarbelakangi program. Dengan mengevaluasi context,

dapat diketahui apakah program relevan dan layak untuk dijalankan

2. Evaluasi *Input*

Pada tahap ini mengevaluasi sumber daya dan strategi yang digunakan sebagai modal dalam pelaksanaan program. Evaluasi *input* membantu menentukan sumber daya yang tersedia sudah memadai dan efektif. Sumber daya ini mencakup analisis terhadap :

- 1) Sumber daya manusia;
- 2) Sarana dan prasarana;
- 3) Anggaran dan strategi;

3. Evaluasi *Process*

Pada tahap ini, mengevaluasi pelaksanaan program secara langsung, apakah proses berjalan sesuai rencan, serta mengidentifikasi kendala dan perbaikan yang diperlukan selama pelaksanaan.

4. Evaluasi *Product*

Tahap terakhir ini, evaluasi berfokus pada hasil akhir dari program, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menilai keberhasilan dengan dampak program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Tinjauan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

2.2.1 Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*Internal Audit*) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pemerintah (Arens dkk., 2009:10).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang kemudian dibawah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam pasal 47 ayat 2 (a) menyebutkan bahwa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan sebuah pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari beberapa instansi, antara lain :

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat Jenderal/Lembaga/Kementerian
- c. Inspektorat Utama
- d. Inspektorat Provinsi
- e. Inspektorat Kabupaten/Kota.

APIP memiliki masing-masing tugas dan wewenang serta komponen-komponen, yaitu pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melaksanakan penyelenggaraan pengawasan akuntabilitas keuangan intern dan pembangunan, atas kegiatan yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; kedua, Inspektorat Jenderal/Lembaga/Kementerian memiliki wewenang melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; ketiga, Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

2.2.2 Kapabilitas APIP

A. Pengertian Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP dijelaskan melalui Pasal 1 Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/JF/2011 mengenai Peningkatan Kapabilitas APIP, yang berbunyi.

“Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif”.

Kapabilitas APIP memiliki arti yaitu sebuah kemampuan APIP dalam melaksanakan aktivitas pengawasan yang menunjang dukungan pengawasan yang baik, sehingga mendapatkan sebuah dorongan berupa hasil pengawasan yang berkualitas sehingga terwujudnya peran APIP yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

B. Matriks Kapabilitas APIP

Dalam penilaian kapabilitas level pada APIP diperlukan suatu kerangka kerja untuk meningkatkan pengawasan intern. Model kapabilitas APIP ini menggambarkan tahap-tahap atau tingkatan-tingkatan kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan APIP dapat berkembang dalam menentukan, menerapkan, mengukur, mengendalikan, membina, dan meningkatkan proses pengawasan audit intern. Setiap tingkatan level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatannya masing-masing tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ukuran atau kompleksitas sebuah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau risiko yang terkait dengan meningkatnya kegiatan, oleh karena itu membutuhkan kapabilitas pengawasan intern yang lebih efisien.

Tabel 4. Matriks Model Kapabilitas APIP

MODEL KAPABILITAS APIP						
	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 5 <i>Optimazing</i>	APIP diakui sebagai agen perubahan.	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi. Proyeksi tenaga/tim kerja.	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan. APIP memiliki Perencanaan strategis.	Laporan efektivitas APIP kepada publik.	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus.	Independensi, kemampuan, dan kewenangan APIP.
Level 4 <i>Managed</i>	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen APIP mendukung organisasi profesi. Perencanaan tenaga/tim kerja.	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi.	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif.	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi manajemen.	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP. Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi.
Level 3 <i>Integrated</i>	Layanan Konsultasi. Audit Kinerja/ Program Evaluasi.	Membangun tim dan Kompetensi. Pegawai yang berkualifikasi profesional. Koordinasi tim.	Kualitas kerangka kerja manajemen. Perencanaan audit berbasis risiko.	Pengukuran kinerja informasi biaya pelaporan manajemen APIP.	Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan. Komponen manajemen tim yang Integral.	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP. Mekanisme pendanaan.
Level 2 <i>Infrastructure</i>	Audit Ketaatan.	Pengembangan profesi individu. Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten.	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya. Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/ pemangku kepentingan.	Anggaran operasional kegiatan APIP. Perencanaan kegiatan APIP.	Pengelolaan organisasi APIP.	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM. Hubungan pelaporan telah terbangun.
Level 1 <i>Initial</i>	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

Sumber : Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Tingkat kapabilitas dan karakteristik suatu APIP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER – 1633/K/JF/2011, yaitu sebagai berikut :

- a. Level 1 (*initial*), pada level ini kapabilitas APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mengetahui peluang terjadinya korupsi sejak dini.
- b. Level 2 (*infrastructure*), pada level ini kapabilitas APIP APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mengetahui secara dini peluang terjadinya korupsi.
- c. Level 3 (*integrated*), pada level ini kapabilitas APIP diharuskan mampu menilai efesiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, menjamin resiko, dan pengendalian Intern.
- d. Level 4 (*managed*), pada level ini kapabilitas APIP sudah mampu memberikan assurance atau jaminan secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- e. Level 5 (*optimizing*), pada level ini kapabilitas APIP sudah dapat menjadi agen perubahan terhadap tata kelola pemerintahan.

Setiap tingkatan level kapabilitas terdiri atas satu atau beberapa *Key Performance Area* (KPA) yang terkait dengan enam elemen pengawasan intern. KPA merupakan pondasi utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP. *Area of Improvement* adalah bidang-bidang dalam KPA yang berdasarkan hasil evaluasi Kapabilitas APIP masih memerlukan perbaikan dalam rangka peningkatan kapabilitasnya. KPA mengidentifikasi yang diperlukan dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern dapat meningkat pada level berikutnya.

2.2.3 Elemen Kapabilitas APIP

Dalam terciptanya level kapabilitas yang tinggi diperlukan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di

lingkungan APIP, yang mengacu kepada enam elemen yang tercantum dan ditentukan dalam IA-CM. Enam elemen tersebut, antara lain :

1. Peran dan Layanan

Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan objektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik, sehingga APIP menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Layanan yang diberikan APIP didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas APIP.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal.

3. Praktik Profesional

Menggambarkan mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP, agar kegiatan APIP dapat terlaksana secara efektif dengan memiliki kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Menyediakan sebuah kegiatan untuk adanya informasi kinerja yang dibutuhkan, baik dalam keuangan maupun non-keuangan guna mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan

pelaksanaan kinerja Aparat Pengawasan dserta mempertanggungjawabkan atas kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

5. Budaya dan Hubungan Organisasi

Mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan APIP, dan hal tersebut memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi.

6. Struktur Tata Kelola

Hubungan pelaporan mencakup hubungan pimpinan APIP dengan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda dan pihak lain di luar organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kebijakan organisasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan APIP dengan struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda secara keseluruhan.

2.3 Internal Audit Capability Model (IA-CM)

Internal Audit Capability Model (IACM) atau Model Kapabilitas Audit Intern merupakan sebuah model yang dikembangkan untuk membantu mengukur kapabilitas dan menilai efektifitas peranan unit audit intern pada suatu organisasi pengawasan di sektor publik. IA-CM mulai dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Elizabeth MacRae, CGAP (*Certified Governmental Auditing Professional*) selaku pelopor penelitian bersama lembaga riset Asosiasi Audit Intern dunia yakni *The Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF)* pada tahun 2009.

Model Kapabilitas Audit Intern ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk menilai kapabilitas unit audit internal sektor pemerintahan yaitu APIP. BPKP mengadopsi Model penilaian IIA tersebut sejak tahun 2011 dalam sebuah pedoman yang ditetapkan dalam Perka BPKP Nomor: PER 1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah. BPKP telah melakukan pemetaan Level kapabilitas pelaksanaan tugas pengawasan intern pada setiap APIP di Indonesia pada tahun 2010, dan hasilnya menunjukkan bahwa dominan 93% APIP di Indonesia masih berada pada level 1 (*Initial*), sedangkan sisanya sebanyak 7% berada pada level 2 (*Infrastructure*). Melihat hasil tersebut, maka Presiden Joko Widodo membuka rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2015 yang diadakan oleh BPKP. Rapat tersebut dilaksanakan karena Presiden menerima laporan, bahwa hasil dari penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP, didapatkan bahwa kapabilitas APIP; level 1 ada 85%, level 2 ada 14%, level 3 ada 1%.

Dengan adanya hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberi target dalam waktu 5 tahun agar BPKP bisa meningkatkan kapabilitas APIP sehingga pada tahun 2019 APIP yang berada di level 3 bisa meningkat menjadi 85%. Dalam mengatasi kurangnya efisiensi terhadap rendahnya level kapabilitas APIP, BPKP menerbitkan *Grand Design* peningkatan kapabilitas APIP (PERKA BPKP No. 6 tahun 2015) dan Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas APIP (Perka BPKP No. 16 tahun 2015).

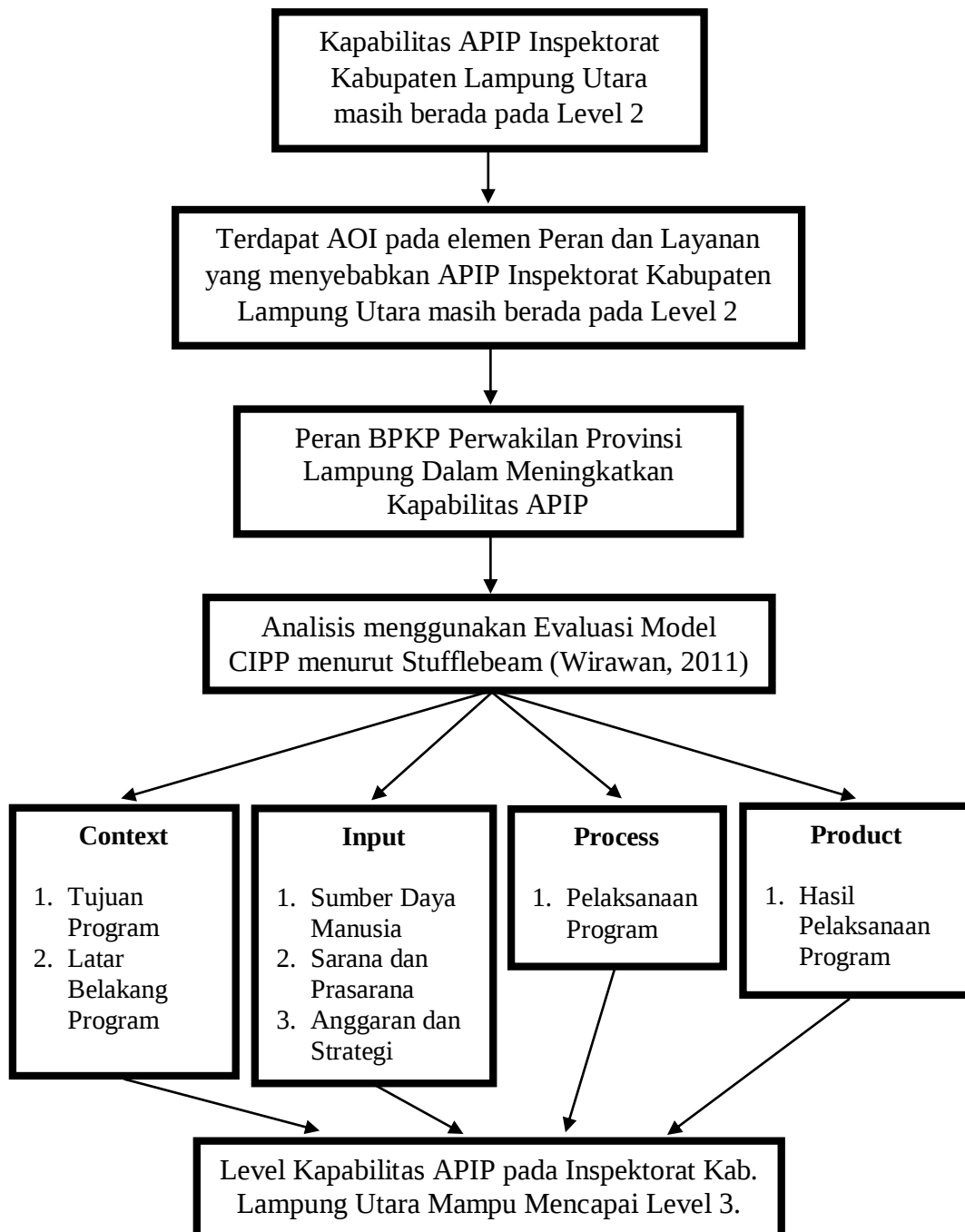
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka yang berisikan konsep-konsep dan kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dicantumkan dengan menggunakan teori sebagai alat dalam menganalisis untuk menjawab pertanyaan dan pemecahan masalah dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Model CIPP menurut Stufflebeam (Wirawan, 2011:92), yaitu :

1. Evaluasi *Context*
2. Evaluasi *Input*
3. Evaluasi *Process*
4. Evaluasi *Product*

Gambar 1. Kerangka Berpikir



(Sumber : Data diolah oleh Peneliti, tahun 2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini memerlukan deskripsi mengenai berjalannya peningkatan kapabilitas APIP di salah satu Inspektorat di Provinsi Lampung. Menurut Sugiyono (2023:18), penelitian kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebuah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan hasil dari penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi.

Pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam pendekatan deskriptif dapat bersikap kuantitatif dan kualitatif, dengan hasil akhir berupa deskripsi rinci tentang karakteristik orang, peristiwa, atau situasi tertentu. Pendekatan deskriptif memberikan landasan berharga bagi pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan melalui data, wawancara, dokumentasi, dan observasi serta pengolahan data yang ditemukan di lapangan. Dasar pertimbangan dalam penelitian ini adalah evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam peningkatan kapabilitas APIP di daerah dengan studi kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, dengan membutuhkan data yang bersifat kontekstual dan faktual untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apa yang menjadi penyebab kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara belum mampu mencapai Level 3, dengan

mengevaluasi selama pelaksanaan program bimbingan teknis yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan peneliti menganalisis data sebelum memasuki lapangan, dimana analisis tersebut dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk fokus penelitian (Sugiyono, 2023:320-321). Penelitian ini berfokus pada latar belakang yang kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dan konsep dalam tinjauan pustaka, dengan demikian fokus penelitian terletak pada Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah, dengan studi kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, terkait kurang tercapainya level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

Fokus penelitian ini telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti jelaskan di tinjauan pustaka, yaitu berfokus pada evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan dan mengatasi AOI dengan melaksanakan program bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP yang didedikasikan kepada APIP Inspektorat Lampung Utara dengan menggunakan teori Evaluasi Model CIPP menurut Stufflebeam (Wirawan, 2011:92) dengan memperhatikan indikator-indikator dari evaluasi tersebut, antara lain :

1) Evaluasi *Context*

a. Tujuan Program

Pada fokus penelitian ini, peneliti menganalisis terkait dengan tujuan program yang mengidentifikasi masalah yang ada dalam konteks program dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh program. Sehingga program dirancang untuk mengatasi kebutuhan dan mencapai tujuan

program peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

b. Latar Belakang Program

Dalam fokus penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan program. Peneliti juga menganalisis kondisi terkait kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2023.

2) Evaluasi *Input*

a. Sumber Daya Manusia

Dalam fokus penelitian ini, evaluasi dilakukan terkait Sumber Daya Manusia pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas APIP berupa bimbingan teknis, dengan melihat kompetensi auditor dalam juga mencapai tujuan program yang akan dilaksanakan.

b. Sarana dan Prasarana

Fokus penelitian ini mengevaluasi mengenai sarana maupun prasana yang diperlukan dan juga menunjang keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Serta mengidentifikasi sarana ataupun prasarana pendukung untuk menunjang keberlanjutan peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung kepada para APIP Daerah di Provinsi Lampung.

c. Anggaran dan Strategi

Pada fokus penelitian ini memantau alokasi selama program berlangsung dan bagaimana strategi atau alternatif dalam meningkatkan program bimbingan teknis yang sudah

terlaksana. Dari pelaksanaan program tersebut apakah efektif dengan pengetahuan dan kapabilitas yang bisa diusahakan oleh para APIP di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

3) Evaluasi *Process*

a. Pelaksanaan Program

Dalam fokus penelitian ini, evaluasi pelaksanaan program melihat apa yang menjadi kendala selama program dilaksanakan. Dengan begitu, tugas dari BPKP Provinsi Lampung yakni untuk mengevaluasi dari internal ataupun eksternal mengenai program yang sudah dilaksanakan.

4) Evaluasi *Product*

a. Hasil Pelaksanaan Program

Pada fokus penelitian ini, mengevaluasi mengenai bagaimana hasil selama program berlangsung, dari awal hingga akhir program, terkait kondisi kapabilitas APIP sebelum dilaksanakannya program dan sesudah terlaksananya program bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan dilapangan atau yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian ini secara umum dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No. 33, Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena data maupun dokumen-dokumen dapat diperoleh dalam mengevaluasi peningkatan kapabilitas APIP Daerah yang dilakukan oleh

BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, serta penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dari bulan April hingga Juni 2025.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber data disebut dengan informan, penentuannya tidak diambil secara random, melainkan diambil dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2023:133), *purposive sampling* merupakan salah satu teknik penentuan sample dengan pertimbangan atau keahlian tertentu, atau yang dianggap paling tahu tentang objek atau situasi sosial yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah auditor yang memiliki pemahaman terkait Kapabilitas APIP dan auditor yang menjadi bagian dari tim program bimbingan teknis APIP. Dari jumlah auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung yaitu 108 auditor, peneliti akan mengambil sebanyak 4 (empat) sample auditor yang dinilai cukup berpengaruh pada evaluasi program bimbingan teknis dalam peningkatan kapabilitas APIP.

Tabel 5. Informan Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Angka Subaran Wiradisastira	Kepala Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
2.	Bentrastyadi	Auditor Ahli Madya selaku Pengendali Teknis Bidang P3A BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
3.	Juliaty Desi Iren Lumbanbatu	Auditor Ahli Muda selaku Ketua Tim Bimbingan Teknis PK APIP BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
4.	Bramastya Datum Alwi	Auditor Ahli Muda selaku Tim Bimbingan Teknis PK APIP BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, tahun 2025)

Peneliti mengambil 4 (empat) sample auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung diatas, dikarenakan dalam penelitian ini para auditor tersebut merupakan informan yang memahami terkait kapabilitas APIP dan

terjun langsung dalam mengimplementasikan program bimbingan teknis dan melakukan evaluasi pada APIP Daerah di Provinsi Lampung.

3.5 Jenis Data

Dalam mengolah data atau kelayakan informasi diperlukan ketepatan dalam memilih sumber data. Oleh karena itu, terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh sendiri secara langsung, yang dimana data tersebut diberikan oleh informan. Data langsung dari lapangan atau tempat objek Penelitian disebut data primer (Sugiyono, 2023:9). Data yang didapatkan melalui teknik wawancara, observasi langsung di lapangan, serta temuan-temuan yang berasal dari permasalahan.

Tabel 6. Keterangan Pengambilan Data Primer

No.	Nama Informan	Instrumen	Waktu
1.	Angka Subaran Wiradisastra, S.E.	Wawancara	29 April 2025
2.	Juliaty Desi Iren Lumbanbatu, S.T.	Wawancara	29 April 2025
3.	Bramastya Datum Alwi, S.E., M.Ak.	Wawancara	29 April 2025
4.	Benstrastyadi, Ak., M.Acc, Ph.D.	Wawancara	23 Juni 2025

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, tahun 2025)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumentasi bisa berupa berkas atau dokumen (Sugiyono, 2023:9). Data yang diperoleh tidak langsung berasal dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, undang-undang, peraturan, artikel serta data lainnya yang diperoleh dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

Tabel 7. Keterangan Pengambilan Data Sekunder

No.	Keterangan Informasi Data Sekunder	Sumber Data	Waktu Pengambilan Data Sekunder
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	29 April 2025
2.	Salinan Peraturan BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	29 April 2025
3.	Materi-Materi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	29 April 2025
4.	Laporan Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kab. Lampung Utara	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	29 April 2025
5.	Cossit atau Anggaran Program Bimbingan Teknis	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	29 April 2025

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, tahun 2025)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Langkah paling utama ialah proses pengumpulan data, karena penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi berupa data untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, dan mengetahui hal-hal lebih dalam dari responden pada jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2023:195). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui observasi. Melalui teknik wawancara, peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih rinci mengenai permasalahan yang ingin diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara jenis struktur, karena peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang dipersiapkan dan ditentukan sebelumnya, dengan disajikan

dalam urutan yang sama untuk para informan, mengenai mengkaji faktor penyebab Inspektorat Kabupaten Lampung Utara belum bisa mencapai kapabilitas APIP level 3 dan pelaksanaan program peningkatan kapabilitas dengan bimbingan teknis oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, catatan numerik, dan gambar yang mencakup informasi dan laporan untuk membantu penelitian (Sugiyono, 2023:196). Peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang riil bahwa peneliti telah benar-benar melakukan penelitian dan dijadikan sebagai acuan peneliti berupa fenomena yang dapat diabadikan untuk jangka waktu yang lama.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil dokumentasi berupa kebijakan terkait Peningkatan Kapabilitas APIP, Program Bimbingan Teknis dilaksanakan, Laporan Hasil Bimbingan Teknis PK APIP. Hasil dokumentasi-dokumentasi peneliti peroleh saat melakukan penelitian di lapangan pada tanggal 29 April 2025.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data, tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk. (Singarimbun, 2008:240) terdiri dari :

1. *Editing Data*

Pemeriksaan atau sering disebut *editing* merupakan pengolahan atau pengecekan kembali penelitian mengenai data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian atau relevansi data yang dengan informasi yang sebenarnya untuk bisa diproses lebih lanjut. Data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diolah, terlebih data hasil dari

wawancara akan dilakukan penyuntingan kata-kata supaya layak disajikan. Kemudian, dari hasil observasi peneliti akan coba mendeskripsikan melalui tulisan sehingga nantinya peneliti mudah dalam menggabungkan dan menyajikannya.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, melainkan data yang diolah kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diolah oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2023:320). Artinya, dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, analisis data dilakukan dari waktu pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip dari Sugiyono (2023:321), menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. **Reduksi Data (*data reduction*)**

Mereduksi data merupakan proses mengolah data yang dimana meliputi merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta pola (Sugiyono, 2023:323). Dengan demikian, data yang telah direduksi atau diolah akan memberikan pandangan yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, serta mencari data kembali jika diperlukan.

2. **Penyajian Data (*data display*)**

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2023:325). Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melalui tahap reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi saat berada di lapangan. Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan atau memberikan tindakan.

3. **Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)**

Langkah terakhir dalam teknik analisis data yakni penarikan dari semua data yang telah diperoleh lalu diolah sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2023:329). Setelah melakukan reduksi data, dan penyajian data, maka peneliti melakukan verifikasi sehingga dapat melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan prosedur dan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk sebuah narasi.

3.9 Teknik Validasi Data

Keabsahan data merupakan pengujian data untuk menilai kebenaran atau validasi data penelitian yang diperoleh dengan analisis kualitatif. Dalam memenuhi kriteria keabsahan data tersebut, peneliti melakukan pengecekan

keabsahan data dengan menggunakan metode uji *credibility* yaitu dengan triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan berbagai cara serta waktu (Sugiyono 2023:358).

Menurut Sugiyono (2023:369-370), triangulasi data dibagi menjadi tiga, antara lain :

- 1) Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan melakukan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, yaitu waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data, saat pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi Data/Sumber, dikarenakan peneliti dalam penelitian ini mengkaji kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, peneliti mengkaji kembali data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, kemudian diverifikasi dengan dokumen-dokumen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pengawasan intern oleh APIP Inspektorat memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kapabilitas pemerintahan daerah. Melalui fungsi pengawasan yang independen dan objektif, APIP memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Namun, terdapat APIP di Provinsi Lampung yang masih belum optimal melakukan pengawasan yang menyebabkan kapabilitasnya masih berada di Level 2, yaitu APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Oleh sebab itu, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung perlu melakukan evaluasi dan juga pelatihan dengan program bimbingan teknis terhadap APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara agar level kapabilitasnya mampu meningkat menjadi Level 3.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam peningkatan kapabilitas APIP di daerah, dengan studi kasus pada APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan evaluasi menghasilkan bahwa yang menjadi penyebab APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan melihat kondisi kapabilitasnya terdapat *Areas Of Improvement* yang berada pada elemen Peran dan Layanan yang masih berada pada Level 2, yang disebabkan karena adanya isu terkait di Kabupaten Lampung Utara, yang melibatkan kasus korupsi proyek konsultansi pihak terkait. Hal tersebut yang menjadikan pengawasan intern di Kabupaten Lampung Utara belum akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Sehingga dirancang program peningkatan kapabilitas APIP dengan cara bimbingan teknis oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung untuk mengatasi penyebab tersebut. Program tersebut berdasarkan regulasi terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan program bimbingan teknis yaitu kurangnya kehadiran dan kontribusi APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk mengikuti program. Dari hasil program yang sudah dilaksanakan, dapat dilihat dari hasil *post test* para APIP yang mengikuti program dinilai sudah menguasai materi terkait peningkatan kapabilitas, dengan presentase nilai diatas rata-rata yang menandakan bahwa pengetahuan APIP sudah mencukupi standar. Setelah program dilaksanakan terlaksana secara optimal, para APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara membuat sebuah rencana aksi yang merupakan suatu bentuk rencana perbaikan terkait langkah-langkah mengatasi kelemahan atau kebutuhan sesuai elemen masing-masing yang diperlukan dalam peningkatan level kapabilitas.

5.2 Saran

Setelah dilakukan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Lampung Utara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan kapabilitasnya. Pertama, melakukan *Early Warning System* terkait *fraud* atau isu strategis yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dengan memperbaiki manajemen SDM dalam hal pendisiplinan waktu APIP dalam mengikuti program peningkatan kapabilitas APIP.

Kemudian, disarankan kepada pihak BPKP Perwakilan Provinsi Lampung untuk dapat melakukan melakukan evaluasi dan penilaian berkala terhadap peningkatan kapabilitas APIP Daerah khususnya di Provinsi Lampung, dengan cara pelaksanaan program bimbingan teknis yang berkelanjutan dengan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan auditor agar bisa memberikan pemahaman yang efektif dan efisien kepada para APIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., et al. 2009. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Buku Satu. Edisi Keduabelas. Terjemahan: Herman Wibowo. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diklat Nasional. 2022. *Pengertian dan Tujuan Bimbingan Teknis (Bimtek)*. Jakarta.
- Firmansyah, dkk. 2022. *Analisis Kapabilitas APIP Dengan Perspektif Internat Audit Capability Model (IA-CM) (Studi pada Inspektorat Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Riset Akuntansi Soedirman, Vol. 1, No. 1.
- Friesta A. L. S. 2020. *Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih)*.
- Ghofar F.R., dkk. 2024. *Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Inten Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara*. YUME : Jurnal of Management, Vol. 7(3), hal 1523-1540.
- Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang *Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*.
- Lila F., Hardo B. 2020. *Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo)*.
- Lilik Purwanti. 2019. *Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menggunakan Internal Audit-Capability Model*. Jurnal Akuntansi, 8(4). 2019. 147-156.
- MacRae, Elizabeth. 2009. *Internal Audit Capability Model: For the public sector*. Florida: IIARF.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pasal 1 Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/JF/2011 mengenai *Peningkatan Kapabilitas APIP*.
- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.
- Peraturan Kepala BPKP RI Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang *Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP*.

- Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 202.
- Sudjana, N. 2008. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (4th ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- The Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF). 2009. *Internal Audit Capability Model (IACM) for the Sector Public*. Florida: Springs.
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi – Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Edisi 1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, S. E. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://diklatnasional.com/artikel-bimtek/pengertian-bimbingan-teknis-bimtek/>
- <https://radarlampung.bacakoran.co/read/6995/kejari-kotabumi-tahan-kepala-lpts-ubl-ini-kasusnya>
- <https://lampung.tribunnews.com/2024/04/30/negara-alami-kerugian-rp-202-juta-kasus-korupsi-di-inspektorat-lampung-utara>